UNRAVELING POLICY COMPLEXITY: PENDEKATAN TEORI SISTEM, KONTINGENSI DAN PERUBAHAN UNTUK MEMAHAMI IMPLEMENTATION GAPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Moh. Azaim[1], Uswatun Hasanah[2], Toib[3]

Universitas Al-Qolam Malang

mohazaim25@pasca.alqolam.ac.id, uswatunhasanahpps25@pasca.alqolam.ac.id.

toibpps25@pasca.alqolam.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini membahas teori-teori analisis kebijakan pendidikan yang digunakan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjawab tantangan perkembangan zaman di era globalisasi dan masyarakat 5.0. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional serta nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian berbagai buku, jurnal, dan literatur terkait kebijakan pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui proses perumusan strategi pendidikan yang sistematis. Dalam analisis kebijakan pendidikan, terdapat beberapa teori dan model yang relevan, seperti teori sistem, teori kontingensi, teori perubahan, model kelembagaan, model sistem, model rasional, model proses, dan model inkrimentalis. Selain itu, pendekatan kritis dalam analisis kebijakan pendidikan juga diperlukan untuk menilai efektivitas, keadilan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Teknik analisis kebijakan pendidikan meliputi analisis deskriptif, normatif, dan evaluatif. Implementasi kebijakan pendidikan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu bersaing secara global.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, analisis kebijakan, teori pendidikan, implementasi kebijakan, pendidikan nasional.

Abstract

This study discusses theories of educational policy analysis used in formulating, implementing, and evaluating educational policies in Indonesia. Education plays an important role in improving the quality of human resources and addressing the challenges of globalization and Society 5.0. Therefore, effective, adaptive, and goal-oriented educational policies are needed to support national education objectives and Islamic educational values. This resea employed a qualitative method with a literature study approach by reviewing books, journals, and other relevant literature related to educational policy. The data analysis technique used was content analysis. The findings indicate that educational policy is part of public policy aimed at achieving national education goals through the formulation of systematic educational strategies. In analyzing educational policies, several relevant theories and models are applied, including systems theory, contingency theory, change theory, institutional models, system models, rational models, process models, and incremental models. In addition, a critical approach to educational policy analysis is necessary to evaluate the effectiveness, fairness, and impact of policies on society. Educational policy analysis techniques include descriptive, normative, and evaluative analyses. Proper implementation of educational policies is expected to improve the

quality of education, ensure equal access to education, and create generations who are faithful, morally upright, and globally competitive.
Keywords: educational policy, policy analysis, educational theory, policy implementation, national education

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan penjelasan di Bab II Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, dan berpendidikan tinggi. (Peraturan SISDIKNAS, 2003)

Pendidikan adalah aktivitas yang sangat kompleks. Proses pendidikan melibatkan hampir semua aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan melibatkan aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologi, sosiolog, dan bahkan agama. Bagaimanapun, agar strategi dan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan Indonesia, penanganan pendidikan harus mempertimbangkan aspek- aspek tersebut.

Pendidikan tidak hanya penting dan penting bagi manusia, tetapi juga merupakan sarana penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam dengan bijak dan memaksimalkan potensi diri. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional, yaitu sistem pendidikan harus menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia untuk berkembang menjadi orang Indonesia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Semua orang yang bekerja dalam dunia pendidikan tentu menginginkan mutu pendidikan.

Setidaknya ada dua alasan utama mengapa kualitas pendidikan sangat penting. Pertama, pertimbangan persaingan. Lembaga pendidikan dan dunia kerja bersaing satu sama lain. Saat ini, setiap calon tenaga kerja harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi agar mereka dapat memperoleh posisi yang lebih baik. Kedua, dengan munculnya

kebebasan dan otonomi institusi pendidikan, kualitas diperlukan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas pasti memiliki tantangan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengawas, dan kepala sekolah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kurikulum nasional dan lokal. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam kualitas pendidikan antara berbagai jenis pendidikan, jenjang, dan lembaga.

Di era 5.0, masyarakat memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan sosial yang semakin kompleks dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian penting dari upaya perubahan bersama masyarakat. Untuk membagi komunitas pembelajaran dan pendorong pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar dalam platpon teknologi dan informasi serta mengembangkan kurikulum secara global dengan memanfaatkan inovasi digital

Banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal. Sebagai sebuah organisasi, Davis dan Newstrom (1985: 152) mengatakan bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia (people), sistem organisasi (structure), sarana dan prasarana (technology), dan lingkungan tempat madrasah itu diselenggarakan (environment). Sebaliknya, input, proses, output, dan hasil yang efektif menentukan kualitas sistem pendidikan. Input pendidikan harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Ini termasuk kondisi lingkungan, sarana prasarana, sumber daya manusia (guru, pengawas, kepala sekolah, dan siswa), visi, misi, kurikulum, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, masukan atau input ini diubah melalui proses belajar mengajar untuk menghasilkan kualitas pendidikan. Sebuah proses dikatakan efektif jika ada iklim yang mendukung input yang mendorong pemberdayaan siswa dan anggota komunitas Pendidikan lainnya. Input dan proses pendidikan sangat penting untuk mencapai hasil dan output pendidikan yang berkualitas.

Tujuan pendidikan haruslah menjadikan semua orang bertaqwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT. (Muhktar et al., 2018). Menghambakan diri adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Menurut Islam, orang harus dididik dengan agaar supaya mereka dapat mencapai tujuan hidup mereka sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. teori dan model analisis kebijakan pendidikan terletak pada perlunya pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur, mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis, sosial, dan politis, serta nilai-nilai agama sebagai landasan normatif. Model-model analisis kebijakan seperti model rasional, sistem, normatif, dan deskriptif sangat relevan untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan tujuan luhur pendidikan Islam.

Oleh karena itu, teori dan model analisis kebijakan pendidikan menjadi alat penting untuk menyatukan tujuan pendidikan nasional dan Islam dengan praktik kebijakan yang nyata. Tujuan ini adalah agar pendidikan menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Berfokus pada buku dan literatur lainnya (Hadi, 1995). Penelitian kepustakaan menggunakan data kepustakaan, terutama buku tentang "implementasi kebijakan pendidikan". Selanjutnya, data yang terkumpul dipilih, disajikan, dianalisis, dan diolah dengan cara yang sistematis dan ringkas. Analisis isi, atau analisis isi, adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini (Muhadjir, 1998).

TEORI DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan (Hasbullah, 2015: 37) adalah terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertuju kepada tindakan (produk). Kata “kebijakan” jika disandingkan dengan "pendidikan" maka merupakan hasil terjemahan dari kata "educational policy" yang berasal dari dua kata, sehingga (Hasbullah, 2015: 40) mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika dilihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan.

H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho melalui kajian yang mendalam Tilaar dan Nugroho (2008: 140) sebagai pakar di bidang pendidikan menyimpulkan bahwa: "Kebijakan Pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu". Definisi lain tentang Kebijakan Pendidikan dikemukakan oleh Arif Rohman (2012: 86), yaitu: "keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta tertentu dalam menyelenggarakan rencana-rencana pendidikan".

Menurut buku Ali Imron Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan negara. Carter V. Good (1959) memberikan pemahaman tentang kebijakan pendidikan. Didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian faktor-faktor situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang

bersifat melembaga. Kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan ekonomi, politik, internasional, dan keagamaan, sangat terkait dengan kebijakan pendidikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan tersebut dapat berubah setiap kali kebijakan publik berubah.

Menurut definisi tersebut, kebijakan pendidikan sangat penting untuk keunggulan dan keberadaan bangsa dalam persaingan global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas utama di era globalisasi. Dia mengklaim bahwa demokrasi diuntungkan oleh globalisasi. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy), atau dengan kata lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kebijakan ini mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, serta strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

B. Dasar Dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

1. Dasar Kebijakan Pendidikan Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140).

2. Tujuan Kebijakan Pendidikan diperlukan terbentuknya rancangan kebijakan rumusan kebijakan dalam pendidikan, guna terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Irianto:29-32), yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.

a. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat Secara proses penyempurnaan demi mencapai harkat dan martabat manusia dengan upaya yang terus menerus. Sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang dalam, oleh karenanya perlu untuk membentuk pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dengan penuh kebhinekaan. Sekalipun pendidikan tidak bebas nilai dan budaya akan tetapi lebih diarahkan pada pembentukan warga negara, oleh karenanya semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab.

b. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik berbeda dengan tingkatan perkembangan sosial. Pada tingkat individual, kontribusi pendidikan dapat membantuperkembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab.Pada lain hal juga diharapkan agar mengerti dan sadar tentang kewajiban dan tanggung jawab peserta didik terhadap bangsa dan negara sehingga wawasan dan perilakunya semakin demoktratis.

c. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi pendidikan adalah Suatu keniscayaan bahwa suatu investasi jangka panjang, adapun alasannya sebagai berikut:Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan adalah fasilitas yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan demikehidupan, sebagai bukti umum bahwa pendapatan seseorang tergantung akan tingkat pendidikannya karena lebih produktif.

C. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut Rusdiana (2015), ada beberapa karakteristik yang membedakan kebijakan pendidikan dari kebijakan lainnya

a. Memiliki tujuan pendidikan. Menurut Lazwardi (2017), kebijakan pendidikan harus mencantumkan tujuan pendidikan yang tepat, jelas, terarah, dan terarah. Memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai dalam bidang pendidikan.

b. Terpenuhinya aspek legal dan formal. Untuk kebijakan pendidikan menjadi sah dan diterima secara konstitusional, persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum diberlakukan hukum yang relevan (Anwar, 2017).

c. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat pedoman/aturan umum.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat

operasional yang dapat diterapkan (Solichin, 2015). Untuk mengukur pencapaian tujuan secara akurat, maka konsep operasional ini perlu dimiliki.

d. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan dibuat dan disusun oleh para ahli yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat kebijakan (Heriawan,
2018). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan masalah terbaru.

e. Memiliki sistematika. Setiap elemen kebijakan pendidikan memiliki prosedur yang diatur. Keberlanjutan, efektifitas, dan efisiensi adalah faktor penting bagi para ahli sistematika. Selain itu, kebijakan harus pragmatis dan tidak diskriminatif dan tidak masuk akal (Rahman, 2020). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang baru dibuat tidak terpengaruh oleh hukum domestik dan internasional.

f. Implementasi kebijakan pendidikan. Karena kebijakan dapat dievaluasi, dipantau, dan dievaluasi selama tahap implementasi di lapangan, tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat di lapangan. Pada tahap ini, orang dapat menarik kesimpulan dan belajar dari penerapan kebijakan.

D. Teori Manajemen Pendidikan

1.Teori Sistem.

Teori sistem memandang sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan, seperti siswa, guru, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan masyarakat. Menurut pandangan ini, keberhasilan sekolah bergantung pada kemampuan setiap elemen untuk bekerja sama dengan baik dan berfungsi secara sinergis. Dengan demikian, penerapan teori sistem di sekolah membutuhkan pendekatan manajemen holistik yang mempertimbangkan semua aspek sekolah. (Sumual dkk., 2024). Teori sistem dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, seperti: meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya; koordinasi elemen meningkatkan kualitas pembelajaran; memungkinkan perencanaan strategis dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan; dan menyediakan mekanisme evaluasi dan umpan balik berkelanjutan.

2. Teori Kontingensi (Contingency Theory)

   Teori kontingensi, menurut Satria dkk., dikutip oleh Sumual et al., menyatakan bahwa manajemen harus disesuaikan dengan situasi tertentu daripada menggunakan satu pendekatan manajemen untuk setiap situasi. Teori ini dalam pendidikan berarti manajemen sekolah harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan lingkungan sekolah, baik internal maupun eksternal. Menurut teori kontingensi, tidak ada satu metode manajemen yang cocok untuk setiap situasi. Kesesuaian gaya manajemen dengan situasi atau lingkungan tertentu sangat penting untuk keberhasilan manajemen. Teori ini dalam pendidikan menyatakan bahwa kebijakan dan strategi manajemen harus disesuaikan dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang tersedia di institusi pendidikan. Misalnya, sekolah dengan sumber daya terbatas harus menggunakan pendekatan manajemen yang inovatif dan adaptif untuk tetap efektif, tidak seperti sekolah dengan fasilitas lengkap dan dukungan kuat. Teori ini membantu manajer pendidikan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.
3. Teori Perubahan (Change Theory)

   Proses transformasi sistem atau proses pendidikan untuk mencapai tujuan adalah fokus dari teori perubahan. Teori kepemimpinan transformasional, seperti teori perubahan, menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek; itu juga mengutamakan inovasi dan pengembangan individu dalam proses pendidikan. Kepala sekolah sering kali bertindak sebagai pemimpin transformasional di sekolah kalangan atas. Mereka mendorong karyawan untuk terus berinovasi, memperbaiki kurikulum, dan membuat pengalaman belajar yang lebih bermakna. Metode ini membantu sekolah mempertahankan daya saing dan mempertahankan reputasi mereka sebagai penyedia pendidikan berkualitas tinggi. (Sumual et al. 2024). Teori perubahan digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengatur pengembangan

profesional guru, penerapan teknologi baru, dan reformasi kurikulum. Teori ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan berdampak positif pada kualitas pendidikan. Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan di mana saja dan bagaimana pun lembaga pendidikan membutuhkannya. Teori Sistem memberi kita kerangka kerja yang luas untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam pendidikan berinteraksi. Teori Kontingensi menekankan betapa pentingnya strategi manajemen menyesuaikannya dengan kondisi tertentu. Teori Perubahan mendukung proses inovasi dan adaptasi saat kita menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Sangat penting untuk memahami dan menerapkan teori-teori ini saat menganalisis dan membangun kebijakan pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan siswa. Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan dalam konteks apa pun yang terkait dengan institusi pendidikan.

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Seperti yang dinyatakan oleh Stokey dan Zeckhuaser, *"A model is simplified representation of some aspect of the real world." Sometimes of an object, sometimes of a situation, or a process. It may be an aphysical representation, a globe, a diagram, a concept, or even a set of questions.* Oleh karena itu, model adalah representasi yang disederhanakan dari sebuah aspek dalam dunia nyata. Meskipun model dapat berupa objek, situasi, atau proses, yang paling penting tetap representasi fisik yang nyata. seperti diagram, sebuah konsep, globe (bola dunia), dan bahkan sederet pertanyaan. Fatah (2012).

Model Kelembagaan (institusionalisme)

Pemerintah membuat model kelembagaan, yang bersifat tradisional karena tidak melibatkan masyarakat atau stakeholder kebijakan dalam perumusan kebijakan. Menurut model kelembagaan, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan kebijakan (Kholifah et al., 2024). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik yang sah dan diakui oleh lembaga negara. Pemerintah memiliki kemampuan untuk memonopoli kebijakan ini dan memaksakannya kepada semua orang. Oleh karena itu,

model kelembagaan sangat cocok untuk membuat kebijakan pendidikan di sektor pemerintahan karena pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Namun, model ini cenderung mengabaikan hubungan yang mendalam antara lembaga dan substansi kebijakan. (Marsari dkk., 2021).

Model Sistem

Tidak seperti model kelembagaan, model sistem melibatkan masyarakat, stakeholder kebijakan, dan pemerintah dalam perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Menurut Kholifah et al. 2024, suatu sistem harus memiliki kemampuan untuk mengatur penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Ini karena struktur sistem terdiri dari elemen-elemen yang mendukungnya dan bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem. Dibandingkan dengan model kelembagaan, model sistem untuk analisis kebijakan pendidikan menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis. Model ini mampu menangani konflik dan pertentangan melalui interaksi antar subsistem yang saling mendukung dengan melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Kemampuan sistem kebijakan untuk menghasilkan hasil yang memuaskan, memperkuat hubungan internal, dan menggunakan otoritas secara efektif menentukan keberhasilannya. Metode ini sangat penting untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-politik.

Model Rasional

Metode pengembangan kebijakan yang dikenal sebagai model rasional melibatkan penggunaan prosedur ilmiah yang efektif untuk mencapai setinggi mungkin manfaat sosial bagi masyarakat. Model ini didasarkan pada positivisme dan rasionalisme, yang berpendapat bahwa masalah dapat diselesaikan dengan memeriksa data secara menyeluruh dan logis. Namun, karena rasionalitas manusia dan ketersediaan informasi yang terbatas, keputusan publik seringkali tidak sepenuhnya ideal. Akibatnya, kebijakan yang dibuat hanya memenuhi standar pembuat kebijakan. Menurut Marsari et al. (2021), model rasional

adalah model perumusan kebijakan yang didasarkan pada teori rasionalisme dan positifisme. Model ini menggunakan rasional dalam perumusan kebijakan untuk memecahkan masalah kebijakan. Menurut Kholifah et al. (2024) model rasional dalam perumusan kebijakan, yang didasarkan pada teori rasionalisme dan positivisme, menekankan penggunaan data valid dan analisis mendalam dalam pemecahan masalah. Model ini seharusnya menghasilkan kebijakan yang ideal, tetapi seringkali gagal karena pembuat kebijakan tidak selalu rasional. Oleh karena itu, penting untuk mengingat bahwa kebijakan yang dibuat mungkin lebih sesuai dengan standar pembuat kebijakan daripada manfaat sosial yang maksimal.

Model Penyelidikan Campuran

Salah satu keuntungan model penyelidikan campuran adalah bahwa itu memungkinkan untuk melihat dua aspek utama dan khusus dari merumuskan kebijakan, yang membuat kebijakan yang ditemukan lebih terperinci. Namun, kelemahan model ini adalah bahwa penyelidikan masalah tersebut hanya terbatas pada beberapa daerah, sehingga banyak daerah yang tidak akan menerima bantuan. Menurut Marsari et al. (2021), model ini menggabungkan model rasional dan inkrimentalis, sehingga cocok digunakan dalam konteks perumusan kebijakan yang luas yang mencakup semua bidang. Hal ini disebabkan fakta bahwa model ini mempertimbangkan perumusan kebijakan dari berbagai perspektif rasional dan inkrimentalis. Aziz dkk., 2020

Model Proses

Model proses memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokusan terhadap elemen irasinal perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahanya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat disahkan (Marsari et al., 2021) Model proses merupakan model perumusan kebijakan yang bersifat tertata karena dimulai dari proses identifikasi masalah penyusunan program, perumusan rancangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelemahan pada

model ini adalah cukup memakan waktu yang banyak dalam proses perumusan kebijakannya.

Model Inkrimentalis

Model inkrimentalis adalah model perumusan kebijakan yang melihat kembali kekurangan kebijakan sebelumnya. Model ini menawarkan model yang praktis karena tidak membuat kebijakan baru dalam jangka waktu yang lama, tetapi hanya berfokus pada perbaikan atau pengembangan kebijakan yang sudah ada. Kholifah et al. 2024 menyatakan bahwa perubahan inkrimental memberikan keamanan terbaik selama proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan yang dapat diandalkan didasarkan pada peristiwa satu-satunya. Untuk mengambil keputusan tanpa mengambil risiko, melanjutkan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan lama membatasi pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakan-kebijakan yang secara relatif tidak banyak berbeda dengan kebijakan saat ini yang berlaku. (Aziz dkk., 2020).

Model Teori Elit

Dalam model teori elit, para ahli kebijakan dan kelompok massa lainnya membentuk kebijakan secara langsung, dan kelompok massa seperti masyarakat biasa hanya dapat menerima dan menerapkan kebijaksanaan yang telah disetujui. Kelompok elitlah yang sebenarnya membentuk opini massa tentang pertanyaan kebijakan, menurut teori elit. Kebanyakan orang apatis, atau tidak memperhatikan, atau tidak peduli, dan kurang informasi tentang kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik ternyata hanya pilihan dan keinginan para elit (Qomaruzzaman, 2021)

PENDEKATAN KRITIS DALAM MENGANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pendekatan kritis untuk menilai kebijakan pendidikan menekankan bahwa kebijakan harus dilihat dari sudut pandang sosial dan politik, bukan hanya dari sudut pandang administratif atau teknis. Metode ini mendorong kami untuk menyelidiki bagaimana kebijakan

pendidikan mencerminkan dan memengaruhi ketidaksetaraan, kekuasaan, dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis kritis berkonsentrasi pada pengungkapan ideologi tersembunyi, ketidakadilan struktural, dan pengaruh kebijakan terhadap kelompok marginal atau kurang berdaya (Rizkwanti & Caspari 2024). Selain itu, pendekatan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai disiplin ilmu dan kerja sama untuk memahami konteks sosial-politik yang kompleks dan membuat rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Metode kritis sangat penting di Indonesia untuk menemukan ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan akses serta mendorong reformasi kebijakan yang dapat menangani masalah sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kritis, analisis kebijakan pendidikan tidak hanya menilai seberapa baik kebijakan itu bekerja, tetapi juga memeriksa proses dan struktur yang mendukung kebijakan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

ANALISIS MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dalam bidang pendidikan, kebijakan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan.Perencanaan pendidikan (perencanaan pendidikan), rencana induk pendidikan (rencana induk pendidikan), pengaturan pendidikan (pengaturan pendidikan), dan kebijakan pendidikan adalah beberapa istilah yang termasuk dalam kategori ini. Menurut Azis (2017), beberapa frasa di atas berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan seberapa efektif dan efisien anggaran pendidikan (Sabri, 2013). Kebijakan adalah tentang proses dan implementasinya, di mana sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan manfaat kebijakan harus dipertimbangkan (Muhdi dkk., 2017).

Menurut pendapat Devine, ada empat dimensi kebijakan untuk kebijakan pendidikan: normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri dari nilai, standar, dan filsafat, dan memaksa masyarakat untuk meningkatkan dan mengubah kebijakan

pendidikan yang ada. Dimensi struktural perlu mendukung dimensi normatif (Munadi dan Barnawi, 2011). Dimensi struktural berkaitan dengan ukuran pemerin Dimensi konstituentif mencakup orang, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan otoritas dalam proses kebijakan.

Sementara itu, Yoyon menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia menggunakan model analisis kebijakan politik yang didasarkan pada asumsi-asumsi politis. Beberapa indikator dapat menunjukkan hal ini. Pertama, asumsi yang digunakan untuk masalah pendidikan tidak jelas. Pendidikan selalu dikaitkan dengan kompleksitas, heterogenitas, sifat, dan kondisi. Karena itu, tidak mengherankan bahwa ketika orang berbicara tentang sistem pendidikan, sistem persekolahan yang paling sering dibicarakan. Analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk mengkaji, merumuskan, dan memahami kebijakan publik dengan tujuan memberikan rekomendasi berbasis informasi tentang keputusan kebijakan dan konsekuensinya. Proses analisis kebijakan mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, pengembangan alternatif, dan penilaian hasil yang mungkin dicapai. Analisis kebijakan pendidikan penting untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengatasi masalah sosial- ekonomi, dan memperkuat pemerintahan. Analisis ini dapat membantu memahami keberhasilan kebijakan, dampaknya pada masyarakat, dan faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan dan pelaksanaannya. Diharapkan bahwa hasil analisis ini akan menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan di masa depan untuk mendorong kemajuan pendidikan.

Ketidaksesuaian kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara tujuan, visi, atau sasaran kebijakan pendidikan dan hasil yang dicapai saat diterapkan. Sebagai contoh, program pemerintah seperti Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk memberi seluruh anak Indonesia lebih banyak pendidikan. Namun, beberapa daerah terpencil menghadapi tantangan untuk menerapkan kebijakan ini. Hambatan-hambatan ini termasuk fasilitas sekolah yang tidak memadai, tenaga pendidik yang tidak memadai, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Tidak adanya kolaborasi antara kebijakan dan

pelaksanaan pendidikan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa contohnya termasuk ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan; anak-anak di daerah terpencil sering kali tidak menerima pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan; dan b) Rendahnya Literasi dan Kompetensi: Kurangnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dapat berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan kompetensi di masyarakat. d) Melemahnya Kepercayaan Publik: Jika kebijakan pendidikan tidak efektif, orang mulai tidak mempercayai pemerintah.

Kompetensi guru adalah komponen utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Guru yang berkualitas memiliki kemampuan pedagogis, profesionalisme, dan keahlian yang cukup dalam bidang mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, pelatihan guru yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, sering dihalangi oleh kekurangan pelatihan guru. Faktor-faktor tersebut termasuk kompetensi guru, infrastruktur, kurikulum, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak yang terlibat. (Dahyanti et al.,2025).

Teknik analisis kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain analisis deskriptif, analisis normatif, dan analisis evaluatif.

1. Analisis deskriptif berfokus pada menggambarkan kondisi kebijakan yang ada.
2. Analisis normatif menilai kebijakan berdasarkan nilai atau standar tertentu.
3. Analisis evaluatif bertujuan untuk mengukur keberhasilan kebijakan setelah diimplementasikan. Teknik-teknik ini membantu pengambil keputusan dalam memahami efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Grindle (1980) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses administratif dan politik. Diagram yang dia buat menunjukkan bahwa proses hanya dapat dimulai jika dimulai. Setelah tujuan dan sasaran yang semula dibahas secara luas, rencana aksi telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk mencapainya. Ini adalah persyaratan penting untuk pelaksanaan kebijakan publik apapun.

Kebijakan publik hanyalah retorika politik atau slogan politik jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Secara teoretik, langkah-langkah perumusan kebijakan dapat digantikan oleh proses implementasi kebijakan, dan pengaktifan program. Namun, pembedaan antara tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan dalam praktik. Ini karena umpan balik dari prosedur implementasi mungkin menyebabkan tujuan dan jalan kebijakan yang sudah ditetapkan harus diubah. Atau, ternyata aturan dan pedoman yang sudah dibuat perlu ditinjau kembali, yang menyebabkan peninjauan ulang pembuatan kebijakan dari perspektif pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Kebijakan Pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dasar Kebijakan Pendidikan Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140). Tujuan Kebijakan Pendidikan diperlukan terbentuknya rancangan kebijakan rumusan kebijakan dalam pendidikan, guna terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Irianto:29-32), yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia menggunakan berbagai teori dan model manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Teori-teori seperti teori sistem, teori kontingensi, dan teori perubahan menunjukkan bahwa strategi manajemen harus disesuaikan dengan situasi tertentu. Adaptasi, inovasi, dan pengembangan diri didorong oleh teori perubahan dan kepemimpinan transformasional. Selain itu, untuk menilai efektivitas, keadilan, dan dampak kebijakan pendidikan dari sisi teknis dan sosial, pendekatan kritis dan model analisis kebijakan seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan. Teknik analisis kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain analisis deskriptif, analisis normatif, dan analisis evaluatif. Analisis deskriptif berfokus pada menggambarkan kondisi kebijakan yang ada. Analisis normatif menilai kebijakan berdasarkan nilai atau standar tertentu. Analisis evaluatif bertujuan untuk mengukur keberhasilan kebijakan setelah diimplementasikan

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., dkk. 2020. Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmiah

Penelitian Ilmiah Vol. 4, No. 2.

Bambang Qomaruzzaman. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Bandung: MPM. Dahyanti, N., et al. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan

Agama Islam, 2(1), 87-100.

Fathoni, W., dkk. Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial. Volume 03 (01)

H. Muhktar, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Standar Kompetensi Manajerial

Kepala Sekolah/Madrasah). Jambi: Salim Media Indonesia.

Iriantara, Y., dkk. Analisis Kebijakan Pendidikan, Teori, Praktik, dan Implemetasi. Widina Media Utama. Bandung.

Kholifah, E. R., et al. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1399-1404.

Majid, A. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Samudra Biru. Yogyakarta

Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 89-94

Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan studi kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik. The Critical Studies Approach and Its Relevance to Public Policy, 49

Rozal, A. 2021. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Journal of Islamic Educatioan Volume 3 (2)

Sumual, S. D. M., et al. (2024). Teori manajemen pendidikan: Suatu analisis konseptual dan aplikasinya di sekolah. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 353-360.